



KR-Antara/Anis Efzudin

MUSIM PANEN TEMBAKAU: Petani memanen tembakau di perladangan lereng Gunung Sindoro, Desa Bantir, Candirot, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (23/8/2023). Petani menyebutkan kualitas tembakau tahun ini sangat baik karena cuaca mendukung dan berharap pabrik rokok bersedia membeli tembakau rajangan dengan harga pantas sesuai kualitas.

MAKI SENTIL KEJAKSAAN

Perkara Korupsi Harus Ditangani Cepat

JAKARTA (KR) - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan harus diproses dan ditangani dengan cepat tanpa dipengaruhi oleh suasana pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Perkara korupsi harus segera diproses jika telah mengantongi alat bukti, karena alat bukti memiliki masa waktu, yang sewaktu-waktu bisa hangus, bisa rusak bersamaan waktu.

"Kalau menurut ku, kalau ada kasus korupsi yang diproses saja selama alat buktinya cukup. Tidak peduli mau pemilu atau tidak," kata Boyamin di Jakarta, Rabu (23/8), menanggapi kebijakan Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin yang menginstruksikan jajaran jaksa terutama yang bertugas bidang intelijen dan tindak pidana khusus untuk cermat dan berhati-hati saat

menerima dan menangani aduan korupsi yang melibatkan calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif dan calon kepala daerah demi mengantisipasi adanya black campaign kepada mereka menjelang dan selama tahapan Pemilu 2024.

Menurut Boyamin, jika perkara korupsi ditunda, dikhawatirkan alat bukti kejahatan 'kerah putih' itu bisa hilang, musnah, atau dimusnahkan. Yang dikhawatirkan lagi, saksi-saksi dapat dipengaruhi, ditakut-takuti, diancam, sehingga semakin lama (proses penanganan perkara) semakin hilang kesaksian-kesaksian. "Jadi ini saya berprinsip istilah keadilan yang tertunda adalah bukan keadilan, *justice delayed is justice denied*," tandasnya.

Selain itu, Boyamin juga mengingatkan amanat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 25 yang

mengatur bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi itu didahulukan dibanding dengan perkara lainnya. "Perkara korupsi kan harus ditangani secara cepat, didahulukan Pasal 25 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mengatakan demikian," ujarnya.

Boyamin berharap, Kejaksaan RI tetap memproses kasus korupsi yang sudah berjalan tanpa perlu terpengaruh oleh momen politik atau tidak. Karena, apabila calon tersebut benar korupsi, akan sangat mengkhawatirkan jika terpilih maka berpotensi melakukan korupsi di kemudian hari.

"Diproses, proses aja tidak perlu ada momen politik atau tidak. kalau memang calonnya tersebut korupsi, malah justru harus diproses korupsi, jangan sampai terpilih nanti dan akan melakukan korupsi," pungkas Boyamin. (Ant/Has)-d

Sambungan hal 1

Sultan

mengikuti ketentuan perundangan yaitu dengan melalui pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan dimulai dari penghasil sampah baik produsen, masyarakat dan lain-lain untuk mencapai target 30 persen.

Sesuai kebijakan dan strategi nasional dan daerah. Sedangkan penanganan dimulai dari pemilahan sampah dengan pemrosesan akhir. Dimulai tahun

2023, telah dilakukan upaya melalui penyiapan dan pengolahan sampah baik melalui penggunaan teknologi atau metode lain.

"Perubahan dari sistem kumpul, angkut, buang menjadi pengurangan dan pengumpulan mulai dari sumbernya di tingkat kabupaten/kota maupun di hilir Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Regional. Selain itu juga di-

lakukan desentralisasi pengelolaan sampah di kabupaten/kota. Misalnya melalui pengelolaan sampah di TPS3R di setiap kalurahan dan edukasi kepada masyarakat untuk memilah dan memilih sampah. Harapannya pada tahun 2026 pengelolaan sampah baik melalui penggunaan teknologi atau metode lain sudah dapat menjangkau seluruh timbunan sampah," paparnya. (Ria)-d

Sambungan hal 1

TVRI

yang masih terkesan *angin-anginan* dijalankan TVRI. Jika tidak ada perubahan baik manajemen dan regulasi yang menyokong TVRI sebagai *public service media*, dapat dipastikan TVRI akan punah sebagai legenda atau legacy.

Ada beberapa hal bisa dilakukan untuk mengukuhkan TVRI sebagai *public service media*. Pertama perlindungan hukum dan peraturan. Media layanan publik memerlukan perlindungan hukum dan peraturan yang ketat untuk menjaga independensinya dari campur tangan politik dan komersial. Sementara sumber pendanaan publik (biaya lisensi atau pajak) membantu memastikan bahwa mereka akuntabel kepada audiensnya. Langkah-langkah tersebut membutuhkan dukungan kuat untuk kebebasan pers dan pemahaman dari para pemimpin politik tentang peran yang dimainkan media layanan publik, terlepas dari seberapa kritisnya kekuasaan dan otoritas tersebut.

Kedua, membuat sistem pendanaan baru untuk lembaga penyiaran publik (TVRI & RRI). Kebijakan ini bisa jadi tidak populer di kalangan masyarakat, namun merupakan salah satu cara

yang tepat untuk memajukan sebagai *public service media*. Alternatif yang bisa dilakukan dengan menarik iuran dengan men-'dompleng'-kan berbagai pungutan pajak seperti pajak kendaraan dan sebagainya.

Ketiga, pemerintah pusat harus melakukan pakta-integritas bagi pemerintah daerah untuk meng-anggarkan sebagian pendapatan asli daerah untuk kepentingan penyiaran publik. Hal ini juga akan mendorong supply besar program acara *local wisdom* bagi TVRI sebagai media penyiaran publik. Keempat, bagi TVRI sendiri haruslah membuat konten yang berkualitas. TVRI tidak perlu melakukan duplikasi terhadap program acara TV swasta, bahkan tidak perlu bersaing dan berkompetisi dengan konten acara mereka, karena karakteristik dan polanya juga berbeda.

Solusi yang bisa dilakukan adalah memproduksi acara yang mengawinkan kualitas dengan daya tarik populer yang luas. Beberapa konten acara tersebut salah satunya adalah penyediaan atau *provide* berita terpercaya dan akurat. Berita yang dapat dipercaya dan akurat

adalah salah satu aspek terpenting dalam *public service media*. Hal ini akan mampu menjadikan TVRI sebagai media garda depan dalam berbagai mitigasi bencana, berita politik yang akurat, lembaga survei yang terpercaya dan sebagainya.

Bukan hanya itu saja TVRI akan mampu membuat program yang mendidik sekaligus menghibur dan berkontribusi pada budaya sendiri baik di tingkat sosial maupun ekonomi. Yang harus digaris bawah di sini adalah konten siaran acara TVRI harus lebih mencerminkan dan mewakili masyarakat.

Kelima, untuk melestarikan TVRI sebagai *public service media* maka perlu peralihan yang cerdas dan terukur ke TV berbasis internet. Beberapa penelitian menyatakan bahwa masyarakat pemirsa saat ini lebih menyukai konten langsung di televisi dan program acara bersifat *streaming*. Hal ini dapat memastikan bahwa konten acara TVRI mudah diakses oleh masyarakat pemirsa melalui perangkat yang terhubung (seperti televisi pintar) dan *platform online* utama.

(Penulis adalah *Associed Profesor MikoM FISIP UPN Veteran Yogyakarta*)-f

Sambungan hal 1

DANA BPJS KESEHATAN 2020-2021 Pengobatan Kanker Habiskan Anggaran Rp 3,5 T

JAKARTA (KR) - Anggaran sebesar Rp 3,5 triliun dana BPJS Kesehatan dihabiskan untuk mengobati penyakit kanker pada 2020-2021. Terbesar untuk kanker paru yang mencapai Rp 73 miliar.

"Pada 2020-2021, Rp 3,5 triliun dihabiskan untuk kanker," ungkap Kepala Sub Direktorat (Tim Kerja) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Kementerian Kesehatan (Kemkes) dr Theresia Sandra Diah Ratih dalam acara yang berjudul 'Kenali Konsensus Baru Nasional Skrining Kanker Paru' yang diikuti di Jakarta, Rabu (23/8).

Dipaparkan, salah satu penyebabnya adalah adanya sejumlah 70 juta masyarakat Indonesia yang mengonsumsi tembakau, dengan 68,9 juta di antaranya yang merupakan perokok aktif. Tembakau berpengaruh kepada tahun hidup yang disesuaikan dengan disabilitas atau disabilitas-adjusted life years (DALYs) sebanyak 64,99 persen. "Tembakau juga berpengaruh pada 66,52 persen kematian akibat kanker trakea, bronkus, dan paru," kata Sandra.

Mneurutnya, kanker paru yang diakibatkan oleh kebiasaan merokok yang lebih mudah ditemukan di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya. Hal tersebut diakibatkan oleh tren usia perokok yang semakin muda, yang juga mengakibatkan rataan usia penderita kanker paru di Indonesia lebih muda lima sampai sepuluh tahun dibandingkan di luar negeri.

Oleh karena itu, kata Sandra, Kemkes mengimbau kepada masyarakat agar segera melakukan skrining kanker paru untuk meminimalisasi kasus penyakit kanker paru yang umumnya baru terdeteksi pada stadium empat.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah menganjurkan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan deteksi dini atau skrining kesehatan secara berkala untuk pengendalian kasus di Indonesia. "Kanker itu dapat dikendalikan, angka survival ratenya tinggi, tapi syaratnya harus deteksi dini. Sekitar 90 persen bisa dikendalikan, kalau ditemukan pada stadium lanjut maka 90 persen akan meninggal," katanya. (Ant/Has)-d

Keragaman

sebagai kekuatan untuk mempersatukan bangsa.

Seperti Mozambik, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa Indonesia merupakan rumah dari keberagaman budaya yang masyarakatnya saling menghargai perbedaan.

Jokowi mengatakan, kunjungan perdananya ke Mozambik menjadi lebih istimewa karena dapat menghadiri acara kebudayaan nasional tersebut. "Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya diundang dalam acara kebudayaan nasional, ini menjadi kunjungan saya ke Mozambik menjadi lebih spesial," ujarnya.

Presiden Republik Mozambik Filipe Nyusi menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi atas kunjungannya ke Mozambik. "Saya ingin berterima kasih kepada sahabat saya, yang terhormat Presiden Republik Indonesia yang telah datang mengunjungi Mozambik," katanya.

Mengawali kunjungan perdananya di Maputo, Presiden Jokowi menghadiri undangan Presiden Republik Mozambik Filipe Nyusi dalam acara pembukaan Festival Budaya Nasional 2023 atau National Festival of Culture Mozambik di Lapangan Asosiasi Red Bulls, Maputo, Republik Mozambik.

Sementara itu Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan, kehadiran Presiden Jokowi dalam KTT BRICS di Afrika Selatan hanya berstatus sebagai tamu undangan. "Bapak Presiden hadir di forum ini untuk memenuhi undangan sebagai tamu, yakni dalam kapasitas

Indonesia yang sedang memegang Keketuaan ASEAN," kata Bey.

Dengan demikian, Bey melanjutkan, kehadiran Presiden Jokowi dalam KTT di Johannesburg, 22-24 Agustus 2023 tersebut tidak berkaitan dengan keanggotaan Indonesia di BRICS. BRICS yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan merupakan kelompok yang bertujuan mempromosikan dialog dan kerja sama bagi negara-negara berkembang. Negara-negara anggota BRICS memiliki pengaruh besar dalam berbagai kerja sama, mulai dari ekonomi, militer, hingga geopolitik.

Secara akumulasi, penduduk negara-negara BRICS mencakup 43 persen populasi dunia dan nilai perdagangannya mencapai 16 persen perdagangan global. Seiring besarnya skala tiap negara serta situasi politik dan ekonomi global yang dinamis, BRICS terus mengkonsolidasikan diri sebagai kekuatan geopolitik dan geoekonomi baru untuk mengimbangi hegemoni negara-negara Barat.

Lebih dari 40 negara dikabarkan ingin bergabung dengan BRICS, antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, Bolivia, Kazakhstan, Kuba, dan Argentina. Indonesia juga disebut-sebut tertarik untuk bergabung dengan aliansi yang telah berdiri sejak 2006 itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan memutuskan terkait kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS. "Nanti diputuskan," kata Jokowi, awal Agustus lalu. (Ant/San)-d

Megawati

Megawati mengaku sangat senang berada di Omah Petroek yang disebutnya berudara segar. Ia berniat menginap dan merasakan suasana di kawasan tersebut dengan tak lupa mengapresiasi para seniman yang mengagas acara. "Jadi *pingin nginep* sini. Ya, kapan-kapan aku tak coba *nginep* sini. Sekali-sekali datang ke acara santai seperti ini, makanya

saya datang ke acara ini. Apalagi di sini udaranya sejuk, *adhem*. Jadi *pingin* bermalam di sini," ucap Megawati.

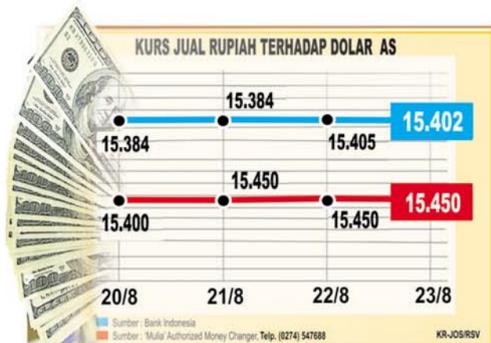
Sementara, Romo Sindhunata yang menjadi tuan rumah turut mengapresiasi kesediaan Megawati hadir di Omah Petroek. Ia menegaskan, acara tersebut bukanlah berbau politik, namun karya budaya. (Fhx)-f

DKPP

tanggapan maupun masukan dari masyarakat. Pihaknya berharap tidak akan muncul permasalahan yang besar pada tahapan ini.

Tidak hanya itu, Ratna Dewi kembali menegaskan DKPP bukan lembaga yang harus ditakuti penyelenggara Pemilu. DKPP dirancang salah satunya untuk melindungi dan menjaga kehormatan penyelenggara Pemilu.

Dosen Hukum Universitas Tadulako ini mengungkapkan, DKPP kerap menjadi inisiator mempertemukan KPU dan Bawaslu dalam menjaga kualitas dan proses Pemilu. "DKPP ini bukan lembaga yang harus ditakuti, bukan pula lembaga pencabut nyawa. DKPP hadir untuk melindungi kehormatan penyelenggara Pemilu," ujarnya. (Ant)-f



Prakiraan Cuaca

Lokasi	Cuaca			Suhu C	Kelembaban
	Pagi	Siang	Malam		
Bantul	☁	☁	☁	22-30	65-95
Sleman	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wates	☁	☁	☁	22-29	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	22-30	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	22-30	65-95



Surya Tri Atmaja Ramadhani, S.Kom, M.Eng
Dosen Teknik Informatika Universitas AMIKOM Yogyakarta

DI tengah perkembangan teknologi, sosial media menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, termasuk WhatsApp. Namun, di balik kemudahan berkomunikasi, terdapat ancaman serius yang perlu diwaspadai, yaitu scam atau penipuan. Bentuk scam yang semakin merajalela di

Mengenal Scam di WhatsApp: Ancaman Malware di Balik Undangan Pernikahan, Pengiriman Paket, dan Sebagainya

WhatsApp adalah penipuan berkedok undangan pernikahan, pengiriman paket, berita duka, dan sejenisnya. Dalam artikel ini, kita akan membahas apa itu scam di WhatsApp, fokus pada penipuan APK malware yang terjadi dengan kedok-kedok tersebut, serta langkah-langkah untuk menghindari dan melindungi diri dari ancaman ini.

Biasanya Scam di WhatsApp dengan Kedok-Kedok Tertentu seperti :

a. Undangan Pernikahan Palsu:
Penipu mencoba menarik perhatian dengan mengirim undangan pernikahan palsu dalam bentuk pesan atau tautan. Saat pengguna mengklik tautan, mereka

dapat diarahkan ke situs web yang meminta pengunduhan APK (berkas aplikasi Android). Pada kenyataannya, APK tersebut mengandung malware yang dapat membahayakan perangkat pengguna.

b. Pengiriman Paket atau Barang Kiriman:
Dalam skenario ini, pengguna menerima pesan dari penipu yang mengklaim ada paket atau kiriman menunggu untuk diambil. Penipu akan meminta pengguna mengklik tautan atau mengunduh APK untuk "melacak" pengiriman, tetapi sebenarnya ini hanya trik untuk memasukkan malware ke perangkat.

c. Berita Duka dan Penggalangan Dana:
Penipu dapat mengirim pesan yang mengaku dari seseorang yang sedang berduka dan membutuhkan dukungan finansial. Mereka meminta pengguna mengklik tautan atau mengunduh APK untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana palsu.

Cara Kerja Scam APK Malware di WhatsApp
Tautan atau APK Palsu:
Penipu mengirim pesan dengan tautan atau tautan unduhan APK palsu kepada pengguna.

Alasan Menarik: Pesan tersebut biasanya datang dengan judul menarik seperti undangan pernikahan, pengiriman paket, atau berita duka.

Instalasi APK Berbahaya: Jika pengguna mengklik

tautan dan mengunduh APK, perangkat mereka dapat terinfeksi malware yang dapat mencuri informasi pribadi, mengkses pesan, atau bahkan mengendalikan perangkat.

Cara Menghindari Scam APK Malware di WhatsApp
1. Selalu periksa keaslian pengirim sebelum mengklik tautan atau mengunduh APK. Hubungi sumber resmi jika Anda merasa curiga.
2. Jangan pernah mengklik tautan dari pengirim yang tidak Anda kenal atau tidak Anda harapkan.
3. Pastikan alamat URL merupakan versi resmi dari situs web yang dijanjikan.
4. Pastikan aplikasi WhatsApp Anda selalu

diperbarui ke versi terbaru, karena versi baru cenderung memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap ancaman malware.

5. Instal aplikasi keamanan yang dapat memindai dan melindungi perangkat Anda dari malware.
6. Pahami cara kerja scam dan malware agar Anda dapat mengenali tanda-tanda bahaya.
7. Jika Anda menerima pesan yang mencurigakan, laporkan kepada WhatsApp dan blokir pengirimnya.

Ancaman scam di WhatsApp dengan kedok-kedok tertentu, seperti undangan pernikahan palsu, pengiriman paket palsu, dan

berita duka palsu, semakin memprihatinkan. Penting bagi kita untuk waspada dan selalu berhati-hati saat menerima pesan dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dengan mematuhi langkah-langkah pencegahan yang disarankan dan meningkatkan pengetahuan kita tentang berbagai skenario penipuan, kita dapat melindungi diri kita dari ancaman malware yang dapat merugikan secara finansial dan privasi.***

